

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai ‘bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik’ (Mardiasmo, 2006:5).

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat, pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporannya, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas

yang semakin rumit dan kompleks. Untuk itu Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Teknologi komputer merupakan salah satu contoh produk teknologi yang telah berkembang pesat yang dapat membantu mempermudah manusia dalam mengolah data serta menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Untuk mencapai tujuannya tiap instansi atau perusahaan memerlukan sistem yang bisa mengatur semua proses bisnis yang terjadi pada instansi. Dari mulai proses mengumpulkan, mengirimkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data-data tentang kejadian atau peristiwa ekonomi yang disebabkan oleh aktivitas atau operasi organisasi sehari-hari, hal ini dapat dilakukan untuk mempercepat pekerjaan yang ada di dalam instansi tersebut. Atas dasar tersebut diatas pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam hal proses integrasi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat dan akurat. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengubah platform pengelolaan keuangan secara fundamental yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor

**Ayu Sugiarto, 2014**

*PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan secara lebih teknis ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) mengacu pada Peraturan Pemerintah 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007. Sistem ini berbasis pada jaringan komputer, yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) dengan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), sehingga data di Pemerintah daerah dapat terintegrasi dengan baik. SIPKD memfasilitasi kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi proses penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban.

Kelebihan dari penerapan SIPKD, selain pemerintah pusat dapat melakukan pengontrolan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, masyarakat pun dapat melihat sejauh mana penyerapan anggaran dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Penerapan integrasi data secara elektronik sudah berlangsung sejak Januari 2010 (PP nomor 56 tahun 2005). Dengan diberlakukannya SIPKD, Pemerintah Kabupaten/Kota berharap SIPKD dapat membantu proses pengelolaan keuangan daerah dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Akan tetapi, ditengah-tengah tumbuhnya penerapan SIPKD pada Pemerintah Kabupaten dan Kota khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang masih terdapat berbagai kendala untuk mendukung dan mencapai keberhasilan penerapan

**Ayu Sugiarto, 2014**

*PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sistem tersebut. Sebagaimana menurut Koordinator Lapangan (Korlap) SIPKD Kabupaten Subang, Bustomi mengatakan bahwa kendala dalam implementasi SIPKD adalah kurangnya kesiapan pegawai pemerintah, penataan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, kurangnya sarana dan prasarana, ketidaksesuaian antara pelatihan dengan kondisi di lapangan, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kelemahan dalam pengendalian internal SKPD. Sebagaimana menurut Kepala BPKP, Mardiasmo dalam sambutannya menyatakan bahwa, “Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Hal ini dikarenakan SPIP mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) Kegiatan yang efektif dan efisien, (2) Laporan Keuangan yang dapat diandalkan, (3) Pengamanan aset Negara, (4) Ketaatan terhadap perundang-undangan” ([www.bpkp.go.id/spip](http://www.bpkp.go.id/spip)).

Pada Semester II Tahun 2013, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2012 pada 108 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam tahun 2013 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas 415 LKPD Tahun 2012.

Adapun permasalahan-permasalahan atas LKPD Tahun 2012 yang tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain adalah adanya

**Ayu Sugiarto, 2014**

**PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pembatasan lingkup pemeriksaan, aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah belum ditetapkan sehingga pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak tertib. Pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum memadai, antara lain transaksi keuangan daerah belum seluruhnya dicatat dalam laporan keuangan, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang belum seluruhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengawasan oleh Badan Pengawas provinsi/kabupaten/kota belum optimal dan sering dijumpai temuan-temuan BPK yang berulang dan lambat ditindaklanjuti (BPK, 2013).

Selain itu, lemahnya pengendalian internal menyebabkan pelaksanaan pemerintah tidak profesional. Sebagaimana menurut auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, Iis Rismawati mengatakan bahwa pengendalian internal di setiap SKPD Kabupaten Subang masih terdapat banyak kendala, yakni aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penyusunan laporan keuangan yang tidak lengkap, SDM yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Sehingga pada akhirnya sangat menentukan *output* dari sistem itu sendiri, salah satunya yaitu mengalami

**Ayu Sugiarto, 2014**

**PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Jika sudah terlambat maka akan mengurangi kualitas informasi dari laporan keuangan tersebut, karena tidak bisa menjadikan dasar kebijakan dan pertimbangan pada penyusunan APBD berikutnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Akuntansi Belanja Badan Urusan Daerah (BUD) Pemda Subang, Bay Zainatuddaroin mengatakan bahwa hampir setiap SKPD Kabupaten Subang mengalami keterlambatan dalam penyerahan laporan keuangan sehingga menghambat proses rekonsolidasi. Selain itu, ketidaklengkapan informasi akuntansi keuangan, laporan keuangan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Publik (SAP), serta kurangnya SDM di bagian akuntansi menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.

**Tabel 1.1**

**Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Subang Tahun 2008-2012**

No	Laporan Keuangan	Opini
1	2008	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2009	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

*Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2013*

Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK tahun 2013 untuk pemerintah daerah Kabupaten Subang dalam tabel 1.1, terlihat jelas bahwa opini yang diperoleh selama 5 tahun terakhir (2008-2012) adalah opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemda Subang masih perlu ditingkatkan lagi.

**Ayu Sugiarto, 2014**

**PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas harus berdasarkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif sebagai berikut :

- (1) Relevan
- (2) Andal
- (3) Dapat dibandingkan
- (4) Dapat dipahami

Dari keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang disebutkan di atas, jelaslah bahwa apabila pemerintah telah menerapkan SIPKD dan pengendalian internal, maka laporan keuangan yang dihasilkan haruslah memperhatikan karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut, sehingga dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam menyajikan laporan yang berkualitas bagi para penggunanya. Untuk itu diperlukan sistem yang dapat memberikan kemudahan, tidak hanya dalam menyusun laporan keuangan secara komputerisasi namun juga dalam penatausahaannya (pengelolaan anggaran) harus ada sistem yang relevan yang dapat mengkonsolidasikan antara entitas akuntansi (SKPD) dan entitas pelaporan (BUD/SKPKD). Dengan adanya SIPKD diharapkan laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu, karena dengan kompleksitas kode rekening dan berbagai jenis laporan yang harus diselesaikan, untuk penatausahaan dan pelaporan yang akurat tidak mungkin lagi dilakukan secara manual.

Hal lain yang mempengaruhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi (Indriasari dan Ertambang, 2008). Pengendalian intern ini menjadi sangat penting karena sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja mau pun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk menyakinkan para *stakeholder* maupun publik tentang keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Nuryanto dan Nunuy Nur Afiah (2010) menyatakan bahwa secara parsial, kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 26,50%, pengendalian internal sebesar 25,96% dan teknologi informasi sebesar 13,15%. Penelitian lainnya dilakukan Angga Dwi Permadi (2013) mengungkapkan bahwa Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Faristina

**Ayu Sugiarto, 2014**

**PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Rosalin, Warsito Kawedar (2011) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Tetapi kualitas sumber daya manusia dan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan mencari pemecahan masalah dengan mengkaji lebih jauh lagi yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
2. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
3. Bagaimana pengaruh Pengendalian Internal secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

4. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

### **1.3 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan mengumpulkan data serta informasi untuk mengetahui pengaruh SIPKD dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab atas permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

### **1.3 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan.

2. Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan informasi sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.